

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Putaran Doha merupakan serangkaian perundingan tingkat menteri yang dilaksanakan WTO untuk membahas berbagai permasalahan terkait perdagangan internasional khususnya dalam sektor pertanian. Putaran tersebut pertama kali diluncurkan pada KTM ke-IV WTO di Doha, Qatar pada tahun 2001. Putaran perundingan ini menjadi menarik untuk dibahas karena ia telah melalui waktu yang cukup panjang dalam proses penyelesaiannya namun belum kunjung menghasilkan kesepakatan.

Dalam hal agenda utama yang menjadi pembahasan dalam perundingan ini, yaitu terkait subsidi pertanian, tema ini juga menarik untuk dikaji karena permasalahan pertanian sesungguhnya sangat dekat dengan kemakmuran di dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Secara tidak langsung dapat dikatakan, terhambatnya penyelesaian perundingan dapat berdampak cukup besar pada perekonomian dunia khususnya negara berkembang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam skripsi yang mengangkat judul “Kegagalan Putaran Doha dan Hegemoni Perdagangan Amerika Serikat” ini penulis tertarik untuk menganalisa mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian Putaran Doha serta kaitannya dengan Kebijakan Perdagangan Amerika Serikat.

B. Latar Belakang Masalah

Kesepakatan perdagangan multilateral pertama yang diakui dunia adalah Perjanjian Umum Tentang Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang dibentuk pada 1948 yang sekaligus menjadi permulaan dimana sistem perdagangan diatur.¹ Latar belakang pembentukan GATT dimulai dari pengalaman pahit depresi ekonomi dunia pada dasawarsa 1930-an yang diikuti dengan pemberlakuan proteksi perdagangan oleh negara-negara besar.

Depresi besar yang kemudian disusul oleh kehancuran Eropa setelah Perang Dunia Kedua, akhirnya membawa pemikiran bahwa diperlukan kerjasama antarnegara melalui kerangka multilateral untuk melaksanakan pemuliharaan Eropa juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada masa itu pelakunya adalah Amerika dan Eropa Barat. Dari kerangka kesepakatan perdagangan bilateral antara Amerika dan Eropa Barat tersebut muncul gagasan untuk memperluasnya menjadi bersifat multilateral dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Apalagi landasan pemikiran GATT pada dasarnya telah selesai dirumuskan pada bulan Oktober 1947. Maka gagasan itu pun ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Perdagangan dan Kesempatan Kerja di Havana, Kuba, tahun 1948.²

¹“Organisasi Perdagangan Dunia” <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm> (Diakses 25 Oktober 2010)

² Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Yogyakarta, 2005, hlm 3.

Konferensi ini menghasilkan Piagam Havana (Havana Charter) dengan visi membentuk organisasi perdagangan internasional, yang mencakup pula isu pembangunan ekonomi serta kesempatan kerja, selain masalah tariff dalam perdagangan internasional. Namun, Kongres Amerika Serikat tidak meratifikasi kesepakatan tersebut. Tanpa Ratifikasi Amerika Serikat, negara-negara lain merasa tidak ada gunanya mengoperasionalkan kesepakatan tersebut. Ketentuan tentang tariff dan perdagangan internasional dari Piagam Havana itulah yang sebenarnya merupakan cikal bakal GATT yang kemudian menjadi operasional pada 1948.³

Dalam pelaksanaannya organisasi tersebut mengatur segala hal mengenai perdagangan terbuka. GATT memuat ketentuan bahwa barang-barang harus bebas masuk ke negara pengimpor, tetapi negara pengimpor boleh mengenakan tariff atasnya. Melalui rejim multilateral tersebut perdagangan internasional dijalankan dengan berlandaskan prinsip *non-discriminatory*, yang berarti bahwa setiap negara mendapatkan perlakuan yang sama ketika berdagang dengan negara lain dan sedapat mungkin melakukan liberalisasi perdagangan dengan meminimalisir hambatan tarif.

Sejak tahun 1948, GATT yang memuat Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan terus menjadi landasan dalam kegiatan perdagangan negara anggotanya. Sejak tahun 1948-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan

³ ibid

mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi.⁴

Namun berbagai kesepakatan yang telah dicapai negara-negara dalam GATT tersebut nyatanya tidak lantas membuat sektor ini terkendali tanpa hambatan. Sejak disepakatinya untuk sementara waktu sebagai akibat gagalnya negara-negara menyetujui pembentukan ITO (International Trade Organization), GATT telah selalu diwarnai tarik menarik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang.

Dalam rentang waktu sejak 1947 hingga 1979, GATT telah mengadakan tujuh putaran perundingan perdagangan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Enam putaran pertama membahas penurunan tarif, tetapi putaran ketujuh yang dikenal sebagai putaran Tokyo (Tokyo Round, 1973-1979) mulai membahas hal-hal lain, yaitu hambatan-hambatan non-tarif, tindakan balasan atas perdagangan tidak adil, dan perlakuan berbeda serta khusus bagi negara-negara berkembang (*special and different treatment*). Selain itu, sebelum Putaran Tokyo, isu pembangunan mulai dibahas dan diakui bahwa negara miskin dengan kemampuan produksi dan perdagangan yang masih lemah perlu diberi kelonggaran khusus. Pengakuan resmi tentang masalah ini ditegaskan kembali dalam Putaran Tokyo yang juga menghasilkan kesepakatan dalam hal subsidi, dumping, pengadaan barang pemerintah, hambatan teknis perdagangan, valuasi tarif cukai, dan lisensi impor. Namun perjanjian ini diikuti oleh banyak negara maju. Tidak banyak negara

⁴ <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm> (diakses pada 25 Oktober 2011)

berkembang yang turut serta karena kesepakatan tersebut dianggap kurang ketat dan bermanfaat.⁵

Dari konferensi Havana hingga Putaran Tokyo, terlihat jelas akan adanya perbedaan kepentingan antara negara-negara "Utara" dan "Selatan". Salah satu kenyataan ironi yang terjadi ialah, ditengah prinsip liberalisasi perdagangan yang merupakan landasan berjalannya GATT, ternyata peraturan tersebut masih memiliki celah untuk berbagai kebijakan negara maju yang mengarah kepada prinsip proteksionisme.

Karenanya pada putaran Uruguay yang dilangsungkan sejak September 1986 hingga April 1994 dibentuklah sebuah organisasi perdagangan internasional yang disebut *World Trade Organization* (WTO) yang ditujukan untuk melaksanakan hasil Putaran Uruguay terkait liberalisasi perdagangan produk manufaktur dan pertanian, jasa, HaKI (Hak Kepemilikan Intelektual), TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan TRIMs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Untuk membuat keputusan mengenai kebijakan dan agenda kerja, dalam WTO dikenal adanya Perundingan Multilateral tertinggi yang lazim disebut sebagai Konferensi Tingkat Menteri (KTM). Ini menjadi forum pengambil kebijakan yang sedikitnya diadakan dua tahun sekali dalam WTO. Putaran Perundingan pertama kali diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua di Jenewa tahun 1998, ketiga di

⁵ Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Yogyakarta, 2005, hlm 5.

Seattle tahun 1999 dan keempat di Doha, Qatar tahun 2001 dan di Cancun tahun 2003.

Pada KTM 1 di Singapura, seharusnya diadakan kaji-ulang terhadap kesepakatan Putaran Uruguay dan mengidentifikasi masalah dalam implementasi kesepakatan-kesepakatan WTO. Namun hal itu tidak terlaksana dan sebaliknya negara maju justru mengusulkan lima isu baru untuk dirundingkan yaitu terkait penanaman modal, kebijakan persaingan (kompetisi), pembelanjaan pemerintah, fasilitasi perdagangan dan klausul sosial mengenai tenaga kerja. Namun negara berkembang menentang kelima isu baru tersebut. Namun keempat isu selain isu klausul sosial berhasil masuk dalam agenda kerja WTO.

Hingga pada KTM ke-II di Jenewa, pembahasan masih berputar terkait masalah investasi yang diagendakan oleh KTM sebelumnya. Keadaan lebih buruk lantas terjadi pada KTM ke-III di Seattle, Amerika Serikat. Dimana terjadi protes masyarakat sipil, pembangkangan negara-negara berkembang. Dalam hal ini ada beberapa hal yang penting untuk dicatat salah satunya adalah kemajuan negara-negara berkembang yang mulai mempersiapkan diri lebih baik dengan memahami isu yang dihadapi dan membentuk koalisi. Saat terjadi kecurangan-kecurangan dalam perundingan, negara berkembang tidak hanya melakukan protes, namun menyerahkan surat resmi kepada Ketua Sidang maupun Direktorat Jenderal WTO mengenai proses yang tidak jujur tersebut. Mereka pun tidak mau menyetujui satu pun dokumen, termasuk usulan menyerahkan mandat negosiasi berikutnya kepada Dewan Umum

(*General Council*) WTO. Dalam sejarah GATT selama lebih dari limapuluh tahun, baru pertama kali itulah terjadi kegagalan sidang.⁶

KTM selanjutnya yaitu KTM ke-IV berlangsung di Doha pada 9 Nopember 2001. Pertemuan ini dihadiri oleh 142 negara. Dalam pelaksanaannya perundingan ini diharapkan mampu menyelesaikan agenda-agenda kerja WTO yang tertunda penyelesaiannya, namun sebaliknya, pertemuan tersebut hanya memperoleh sedikit kemajuan dengan dirumuskannya dokumen utama berupa Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha) yang menandai diluncurkannya kembali putaran perundingan menyeluruh mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.

Adapun agenda utama dalam pertemuan ini tidak lain adalah untuk membuka peluang negosiasi antar negara dengan tujuan perbaikan akses pasar secara substansial, mengurangi secara bertahap segala bentuk subsidi ekspor dan pengurangan secara substansial segala bentuk dukungan dalam negeri yang mendistorsi pasar.⁷ Pada saat itu data World Bank menyebutkan fakta yang memprihatinkan terkait tingginya subsidi yang diberikan negara-negara maju untuk melindungi sektor pertaniannya. Sebanyak tiga negara adidaya anggota WTO yang memberikan subsidi, di antaranya Uni Eropa (US\$151 miliar per tahun), Amerika Serikat (US\$102 miliar per tahun), dan Jepang (US\$49 miliar per tahun). Pemerintah negara maju melihat subsidi tersebut sebagai satu alat yang kuat untuk mengatasi

⁶ ibid

⁷ <http://tamachopa.com/2008/09/gagalnya-putaran-doha.html> (diakses pada 11 November 2011)

masalah-masalah sosial ekonomi dalam negeri hingga enggan meninggalkannya. Padahal jumlah subsidi negara tersebut contohnya AS lebih tinggi dari GNP negara Filipina sebagai negara berkembang pada tahun yang sama. Jika subsidi bisa dihapuskan akan meningkatkan pendapatan petani sebesar US\$300 miliar per tahun.

Ketimpangan tersebut jelas sangat berdampak bagi sektor pertanian negara berkembang, dapat dilihat dari tingkat produktivitas yang pada umumnya merosot, baik jagung, kedelai maupun gula. Ini menunjukkan bahwa harga pangan yang murah telah mengurangi insentif petani untuk menggunakan teknologi baru sehingga telah berpengaruh buruk terhadap produktivitas.

Disamping itu upah riil buruh tani sebagai indikator kemakmuran buruh yang bekerja di sektor pertanian terus menurun. Contohnya di Indonesia pada periode 1991-1995 misalnya, upah buruh mencapai Rp 5.550/Hari Orang Kerja (HOK), kemudian merosot menjadi Rp 3.700/Hari Orang Kerja. Upah buruh ini semestinya dapat diharapkan meningkat apabila produktivitasnya juga meningkat.⁸

Negara-negara maju juga terus menerapkan kebijakan yang jelas-jelas menutup terbukanya peluang pasar bagi negara berkembang. AS misalnya pernah melakukan embargo kedelai tahun 1973 dan 1975 sehingga harga kedelai melonjak naik. Negara-negara Eropa juga membatasi ekspor serelia (kuantitatif kontrol atau pajak) periode 1995-1996, dengan alasan untuk melindungi konsumen dalam negeri.

Hal ini tentu saja menimbulkan respon buruk dari negara-negara yang tidak menerapkan subsidi karena produk mereka akan kalah bersaing dalam pasar

⁸ <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm> (diakses pada 25 Oktober 2011)

perdagangan dunia hingga menimbulkan aksi perlawanan dengan melakukan proteksi balasan. Sedangkan di negara berkembang yang memang terikat oleh peraturan yang relatif lebih ringan dengan lebih fleksibelnya aturan-aturan mengenai proteksi sejatinya juga tidak meraup keuntungan maksimal. Hal tersebut terjadi karena kegagalan persaingan harga produk negara berkembang dengan negara maju yang jauh lebih murah.⁹

KTM ke-IV tersebut juga tidak terlepas dari sejumlah permasalahan, bahkan hingga waktu akhir pertemuan tersebut belum mampu membuahkan kesepakatan yang berarti. Yang lebih buruk adalah kenyataan bahwa Putaran tersebut bahkan belum menghasilkan titik temu antarnegara hingga KTM selanjutnya yang dilaksanakan di Cancun pada September 2003 dimana Direktur Jenderal WTO Supachai Panitchpakdi menyatakan bahwa:

”Tidak bisa dipungkiri deadlock yang dialami merupakan suatu kemunduran. Sangat penting untuk mengembalikan perundingan ini ke arah yang benar. Jika Agenda Pembangunan Doha gagal, yang rugi ialah kaum miskin di dunia.”¹⁰

Hingga KTM ke-V, Putaran tersebut dapat dikatakan mengalami jalan buntu dan tidak berhasil merumuskan kesepakatan tentang target utama perundingan terkait tiga pilar utama dalam sektor pertanian yaitu akses pasar, dukungan domestik, dan subsidi ekspor. Perundingan atas Putaran Pembangunan Doha secara keseluruhan

⁹ “Trade Policy for A Better Future”, GATT Secretariat, Geneva, 1985

¹⁰ Dr. Hata, SH., MH. “Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional”, Jakarta, 2000.

hanya mampu menghasilkan 3 keputusan (pada KTM ke-IV WTO)¹¹. Rumusan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Deklarasi Para Menteri (Ministrial Declaration) yang memuat program kerja sampai KTM V WTO dua tahun mendatang dan tindak lanjut atau pengorganisasian program kerja tersebut. Dalam deklarasi tersebut disebutkan tujuan dan jadwal perundingan di berbagai sektor dengan rencana penyelesaiannya paling lambat 1 Januari 2005.
- Deklarasi mengenai Persetujuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang terkait dengan perdagangan dan akses terhadap kesehatan masyarakat (Declaration on TRIPs Agreement and Public Health). Deklarasi ini memuat suatu fleksibilitas bagi negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan HAKI agar masyarakat dapat memperoleh obat esensial yang diberi patent dengan harga murah, khususnya untuk penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat seperti epidemi, malaria dan HIV/AIDS.
- Keputusan menteri tentang implementasi dan masalah terkait dengan persetujuan WTO yang ada saat ini. Keputusan ini memuat sejumlah persetujuan WTO yang akan dibahas untuk diperjelas lebih lanjut dalam perundingan mendatang.

¹¹ <http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-December/000507.html> (diakses pada 20 Oktober 2011)

Dari keputusan-keputusan diatas dapat dilihat bahwa keputusan para menteri tersebut masih bersifat normatif dan bahkan tidak menyentuh substansi paling penting dari tuntutan mayoritas negara anggota yaitu terkait pengurangan subsidi pertanian di negara maju. Selain itu sifat perundingan WTO yang mengusung prinsip *single undertaking* atau tidak ada yang disepakati sampai disepakatinya kesepakatan menyeluruh membuat sulitnya kesepakatan tercapai dalam perundingan perdagangan tersebut.

C. Pokok Permasalahan

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan suatu pokok permasalahan yaitu: Faktor-faktor apa yang melatari kegagalan Putaran Doha dalam menghasilkan kesepakatan pada permasalahan subsidi di sektor pertanian?

D. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, diperlukan seperangkat teori maupun konsep sebagai pijakan dasar untuk memulainya. Penulis disini mengambil teori dan konsep yang relevan untuk menganalisa permasalahan yang sedang dianalisa antara lain:

1. Teori hegemoni

Teori hegemoni merupakan sebuah teori yang paling penting di abad XX. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci (1891-1937). Suatu konsep menyatakan bahwa Hegemoni adalah satu bentuk supremasi dari satu atau beberapa kelompok

atas yang lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang dinamakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik¹².

Melalui teori hegemoni, Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. *Pertama*, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcement*. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (state) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara.

Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga. Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (*civil society*) melalui lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*). Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi hegemoni dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintahan yuridis¹³.

¹² Muhadi Sugiono, “Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga”, Yogyakarta, 2006, hlm 31.

¹³ <http://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/artikel/article/view/387> (diakses pada 20 November 2011)

Sebagai pemenang perang dunia kedua, posisi Amerika Serikat menjadi terangkat sebagai sebuah negara pemimpin yang hampir tidak tersaingi. Negara tersebut lantas merasa harus mengambil tanggung jawab untuk menciptakan perekonomian pasar yang liberal. Para pemikir internasionalis liberal, yang diwakili oleh Wall Street dan Departemen Luar Negeri Amerika berpendapat karena depresi besar-besaran di akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an bisa dikaitkan dengan berbagai hambatan dan control negara atas aktivitas ekonomi, maka solusi satu-satunya bagi problem ekonomi dunia adalah dengan kembali pada tatanan ekonomi dunia yang terbuka. Amerika kemudian mengambil peran sentral dalam menentukan institusi dan peraturan baru yang mendasari perekonomian dunia liberal yang berubah. Dimana sistem tersebut lantas dikenal luas dan diadopsi oleh GATT. Sistem tersebut tidak lain ialah “Sistem Bretton Woods” yang diambil dari sebuah nama kota kecil di Amerika Serikat tempat persetujuan tersebut dibuat pada 1947.

Sistem perdagangan terbuka atau dikenal dengan istilah Sistem Liberal tersebut bila dikaji tidak lain adalah agenda strategis Amerika untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Hal tersebut dilanggengkan dengan memprakarsai terbentuknya suatu lembaga perdagangan yang dapat dikendalikan, Amerika sebagai kekuatan industrialis dominan dunia akan memperoleh akses yang lebih baik bagi pasar luar negerinya.¹⁴

¹⁴ Robert Jackson & Georg Sorensen, “*Pengantar Studi Hubungan Internasional*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 250

Dalam konteks ini, pembentukan International Monetary Fund (IMF) atau sistem Bretton Wood juga tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya sebuah tatanan ekonomi liberal seperti yang diharapkan Amerika. AS harus mampu menyediakan bantuan keuangan bagi Eropa yang mengalami krisis dan disalurkan melalui Program Pemulihan Eropa (dikemudian hari dikenal dengan Marshall Plan).

Hasilnya, bukan saja Marshall Plan melapangkan jalan bagi hubungan Atlantik yang kokoh, namun juga membuka peluang penerimaan terhadap kebijakan internasionalis liberal AS pasca perang di kalangan sekutu-sekutu Eropanya. Berkat Marshall Plan pula AS berhasil mendorong sekutu-sekutunya di Eropa Barat untuk menerima perdagangan dan kebijakan nilai tukar mata uang yang lebih liberal.

Nilai-nilai liberal yang sesuai dengan ideologi Amerika Serikat yang terbukti terserap dalam institusi internasional seperti WTO dan IMF telah mampu memberikan Amerika Serikat sejumlah besar apa yang disebut Joseph Nye sebagai “kekuatan co-optive” yaitu kemampuan untuk membentuk situasi sehingga bangsa-bangsa lain mengembangkan pilihan-pilihan atau untuk menentukan kepentingan-kepentingannya dengan cara yang sesuai dengan bangsanya. Dalam Perdagangan Internasional, Grieco mengatakan bahwa selalu ada tantangan dalam kerjasama atau organisasi internasional yaitu karakter anarki dari masing-masing negara. Anarki berarti tidak ada pengaturan tunggal yang bisa mengatur perilaku semua negara. Oleh karena watak anarki inilah, kata “keadilan” menjadi sesuatu hal yang sulit dicapai dalam tatanan internasional. Setiap negara berusaha memaksimalkan kepentingannya, dan ini mengantarkan pada upaya pencapaian kekekalan hegemonik

negara. Dengan keadaan seperti ini, posisi negara berkembang akan semakin terpojok dan *fair trade* hanya akan menjadi slogan serta gerakan utopia semata.

Dalam kaitannya dengan hambatan yang terjadi dalam tercapainya kesepakatan Putaran Doha, penulis melihat bahwa pengaruh dari kekuatan hegemoni Amerika Serikat masih sangat memegang peranan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kronologi perundingan yang lebih menitikberatkan pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Dengan kata lain, meskipun negara-negara berkembang telah mendesak agar dalam putaran perundingan tersebut disusun suatu peraturan terkait pembatasan subsidi domestik pemerintah dalam sektor pertanian, namun karena Amerika Serikat dalam hal ini negara hegemon memiliki kepentingan yang berbeda dari rancangan tersebut, maka perundingan pun menjadi sulit bahkan terhambat menghasilkan kesepakatan terkait poin tersebut.

Adapun strategi yang digunakan AS dalam melanggengkan hegemoninya dalam putaran doha lebih mengarah kepada penggunaan *soft power* yaitu dengan lobi-lobi yang mengarah kepada *soft diplomacy*. Dalam kasus ini AS masuk ke dalam perangkat kerja WTO untuk mempengaruhi jalannya perundingan. Sebagaimana diketahui, Keberhasilan soft power sangat tergantung pada reputasi pelaku dalam komunitas internasional. *Soft power* sendiri tidak akan berarti banyak jika tidak di support oleh *hard power* yang memadai, terutama dalam konteks kekuatan ekonomi dan tentunya juga pertahanan ataupun militer yang diperhitungkan orang, karena soft power semata-mata saja tidak akan pernah cukup

untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negeri suatu bangsa dengan kata lain AS menggunakan hegemoninya dalam melakukan lobi.

2. Teori Merkantilis

Merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa “kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volum perdagangan global teramat sangat penting”.¹⁵ Modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah (sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor (dengan banyak insentif) dan mengurangi import (biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar). Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme.

Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada sebagai wilayah kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan kata lain dalam prinsip perdagangan internasional tidak mungkin terlepas dari prinsip *zero-sum* dimana keuntungan suatu negara tidak lain merupakan suatu kerugian bagi negara lain.

¹⁵ id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme (Diakses Pada 20 November 2011)

Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dalam ranah perdagangan internasional pada 1970-an mulai mengalami defisit perdagangan untuk pertama kalinya dalam era pasca perang. Dalam situasi baru ini, kebijakan Amerika Serikat menjadi lebih berorientasi kepada kepentingan nasional. Alih-alih mempertahankan perekonomian dunia liberal pasca 1945, Amerika Serikat justru melaksanakan langkah-langkah proteksionis untuk mendukung perekonomiannya sendiri.

Hal tersebut sejalan dengan terus gagalnya upaya negara berkembang untuk memaksa Amerika Serikat agar menurunkan subsidi domestik negara tersebut khususnya dalam Putaran Doha sementara AS dikenal sebagai pengusung liberalisasi perdagangan yang dibangun melalui rezim Bretton Woods yang menjadi prinsip WTO, dapat dikatakan Amerika Serikat telah melakukan inkonsistensi dalam kebijakannya yang proteksionis dalam sektor pertanian tersebut.

E. HIPOTESA

Dari penguraian sebelumnya baik mengenai data-data yang ditemukan serta dengan menganalisa dengan menggunakan kerangka teori diatas, maka penulis dapat membuat hipotesa dari permasalahan yang terjadi yaitu:

- Putaran Doha gagal karena adanya pengaruh hegemoni Amerika Serikat dalam menangkalkan keinginan negara-negara berkembang dalam sektor pertanian.
- Amerika Serikat dalam konteks kegagalan Putaran Doha menerapkan prinsip merkantilisme dalam kebijakan perdagangannya.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan waktu dari data yang digunakan oleh penulis adalah terutama dalam rentang waktu pelaksanaan Putaran Doha bulan November tahun 2001 hingga tahun 2003 yaitu hingga pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri berikutnya yaitu KTM ke V di Mexico. Namun tidak menutup kemungkinan bila data yang digunakan adalah data dalam rentang waktu sebelum 2001 ataupun data setelah tahun 2003 selama data yang digunakan tersebut masih relevan guna menunjang pembahasan masalah.

G. SUMBER DATA

Dalam penyusunan karya tulis ini data yang digunakan adalah data-data sekunder yang diperoleh melalui unduhan internet dan analisa maupun kutipan dari berbagai literatur termasuk di dalamnya buku, jurnal, tabloid, majalah, dan bahan bacaan lainnya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

Berisi penjelasan awal yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, sumber data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Memuat latar belakang dibentuknya GATT yang kemudian berubah menjadi WTO, prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya hingga permasalahan yang dihadapi para anggota dalam menjalankan sistem perdagangan nasional

BAB III

Memuat data mengenai target serta capaian yang telah dirumuskan dalam Putaran Doha hingga bukti-bukti kegagalan putaran itu sendiri.

BAB IV

Memuat faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan Putaran Doha serta data dan analisa terkait faktor-faktor tersebut

BAB V

Merupakan bagian yang akan berisi rangkuman dan penegas dari bab-bab sebelumnya.